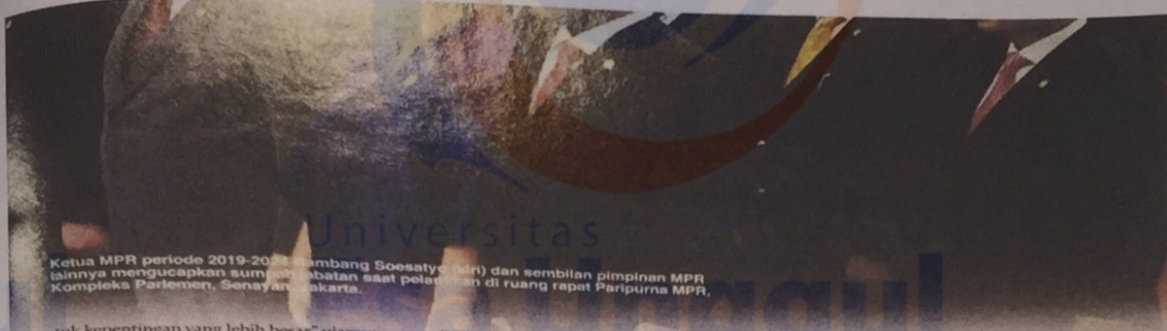


# LAMPIRAN



Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (kiri) dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

...tuk kepentingan yang lebih besar," ujarnya. Gerindra pun menyerahkan kursi MPR-1 untuk Golkar. Bamsoet mengatakan tidak ada persaingan lagi setelah pemilihan ketua MPR ini. "Kami sudah bersatu," ujar politikus berhaluan RpoS miliar itu.

### Megejutkan di DPD

Perebutan sengit ini menunjukkan kursi MPR-1 masih seksi untuk dikuasai parpol, baik koalisi pemerintah maupun oposisi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengatakan pertarungan itu lebih pada urusan gengsi parpol saja. "Mereka sendiri tahu MPR ini tidak punya kewenangan yang cukup strategis," ujarnya kepada Nini Hilaliyah dari *SINDO Weekly*, Kamis pekan lalu.

Memang, dari pemilihan pimpinan tiga lembaga tinggi negara yang ada di Senayan, hanya DPR yang adem. Ini tak lain karena sudah ditentukan dalam UU MD3 pimpinan

DPR adalah parpol dengan jumlah kursi terbanyak. Tanpa banyak pertentangan, kursi DPR-1 menjadi milik Puan Maharani, puri mahkota Teuku Umar. Puan dilampangi Azis Syamsuddin (Golkar), Rahmat Gobel (NasDem), Cak Imin (PKB), dan Sufmi (Gerindra).

Yang tak terduga di Senayan adalah terpilihnya La Nyalla Matalitti sebagai Ketua DPD. Pria penuh kontroversi menyingkirkan elite Golkar yang memilih pindah haluan ke DPD, Mahyuddin, petahana Nono Sampono, dan Sultan Baschtiar Najamuddin. Banyak pihak mempertanyakan rekam jejaknya di masa lalu. La Nyalla pernah tersangkut kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim sebesar Rp1,1 miliar. Namun, ia berhasil lolos setelah hakim memvonis bebas pada Desember 2016.

Ia juga dianggap gagal saat memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kementerian Pemuda dan Olahraga

(Kemenspora) bahkan membekukan kepemimpinan PSSI era La Nyalla.

Kontroversi pun ia buat saat baru terpilih menjadi ketua DPD. Belum apa-apa, La Nyalla sudah meminta dana langsung dan bisa membawa staf saat kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. "Seperti yang terjadi di DPR," ujarnya.

Lucius menilai keberadaan La Nyalla akan sulit membawa DPD ke arah perubahan. Ini akan membuatnya lebih banyak bergelut dengan masalah pribadi dibandingkan menyelesaikan yang ada di depan sebagai pemimpin. "Ini potret suram lembaga DPD," pungkasnya.

Terpilihnya Bamsoet, Puan, dan La Nyalla sebagai pucuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD mengesankan koalisi pemerintah. Sebaliknya, kelompok partai oposisi yang dipimpin Gerindra sama sekali tidak bertaring.

Wahedi W. Bahri

## Beberapa Hasil liputan penulis

Oktober nanti, kita akan turun ke jalan lebih besar lagi," cetus Dino kepada Nini Hilaliyah dari *SINDO Weekly*, Kamis pekan lalu.

Tuntutan itu bukan isapan belaka. Jumat pekan lalu, Dino bersama beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Doni belum puas dengan demonstrasi mahasiswa pada 23-24 September lalu. Kendati DPR memang sepakat menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU KUHP, Lembaga Pemasyarakatan, Pertanahan, dan Minerba), masih ada kontroversi yang belum selesai, yakni UU KPK.

Revisi itu memang sudah di tangan Presiden Jokowi. Masih ada 90 hari bagi mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu

untuk menimbang atas beleid komisi anti-rasuah. Artinya, UU KPK yang baru akan berlaku sah pada 17 Oktober. Kendati begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu perbaikan uji materi revisi UU KPK hingga 14 Oktober 2019. Hanya saja, saban hari santer kabar Perppu KPK tak jadi akan dikeluarkan.

Bila Perppu urung diterbitkan, boleh jadi unjuk rasa bakal kembali berlanjut. DPR memang terus menjadi sasaran demonstrasi dalam dua pekan terakhir. Tak hanya mahasiswa, massa itu dari kalangan pelajar dan buruh. Bahkan, unjuk rasa itu kerap berujung riuh. Pada 23-24 September, aksi demonstrasi meletup di berbagai kota. Ribuan mahasiswa tumpah ruah ke jalan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Pur-

wokerto, Makassar, Balikpapan, Samarinda, dan lainnya. Isi tuntutan yang hampir sama: menolak RUU yang kontroversial.

Di Jakarta, sekitar belasan ribu mahasiswa mengepung kawasan DPR/MPR, Senayan. Mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), mereka mengusung tujuh tuntutan di depan gedung kura-kura tersebut. Isi tuntutan yakni menunda RRUHP, mendesak pembatalan revisi UU KPK, menuntut negara mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.

Tuntutan lainnya yaitu menolak RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Terakhir, yakni mendorong proses demokrasi di Indone-

